

POLA RELASI SOSIAL DALAM IMPLEMENTAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KOTA MALANG

Implementas Pattern in Social Relations Program National Urban Community Self (PNPM-MP) in Malang

Juli Astutik

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: astutik_77@yahoo.com

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem that requires openness handling various parties. The approach not only in regards to the results but no less important is the process, family empowerment is not solely related to the aspect of economic and material or technology, or non-material aspects such as autonomy (power). More than that empowerment means also relates to how social relations that occur between the implementers and recipients, to support the success of a program. The results showed that: 1) the pattern of relationships among implementers show patterns of communication networks that are all the channels that allow all the implementers mutual interaction / social relationships, which leads to cooperation (cooperation). 2) the pattern of social relays between implementers with the receiver indicates the type of communication network pattern in the form of Y and Circles, while 3) the pattern of relationships among program beneficiaries showed patterns of circles and all channels, given that between the members participating in the program are still neighbors know each another relatively occur even in their daily communication, there is even still brothers. Recommendations from this study are as follows: Patterns of communication networks is supposed to run the executive, should perform network patterns that are all channels which allow all implementers to berpartisipasi active, which in turn can occur coordinated so as to create cooperation among fellow executor, at every stage activities from the beginning to the evaluation, monitoring and even reached the stage of termination.

Keywords: Patterns of social relations, implementation, PNPM Urban

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterbukaan berbagai pihak. Pendekatan bukan hanya menyangkut masalah hasil namun yang tidak kalah penting adalah proses, pemberdayaan keluarga tidak semata-mata menyangkut aspek materiil ataupun ekonomi dan teknologi, ataupun aspek non material seperti otonomi (kekuasaan). Lebih dari itu pemberdayaan berarti pula menyangkut bagaimana relasi sosial yang terjadi antara para pelaksana dan penerima, untuk menunjang keberhasilan sebuah program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pola relasi antar pelaksana menunjukkan pola jaringan komunikasi yang bersifat semua saluran yang memungkinkan semua para pelaksana saling melakukan interaksi/relasi sosial, yang mengarah pada kerjasama (*cooperation*). 2) pola relai sosial antar pelaksana dengan para penerima menunjukkan jenis pola jaringan komunikasi dalam bentuk Y dan Lingkaran, sedangkan 3) pola relasi antara sesama penerima program menunjukkan pola lingkaran dan semua saluran, mengingat bahwa antar sesama penerima program masih bertetangga yang saling mengenal satu sama lain bahkan relatif terjadi komunikasi dalam kesehariannya, bahkan ada yang masih bersaudara. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pola jaringan komunikasi yang seharusnya dijalankan para pelaksana, hendaknya melakukan pola jaringan yang sifatnya semua saluran yang memungkinkan semua para pelaksana untuk berpartisipasi aktif, yang pada akhirnya dapat terjadi koordinatif sehingga tercipta kerjasama antar sesama pelaksana, di setiap tahapan kegiatan mulai dari awal sampai dengan evaluasi, monitoring bahkan sampai pada tahap terminasi.

Kata kunci : Pola relasi sosial, implementasi, PNPM Mandiri Perkotaan.

PENDAHULUAN.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial dan bukan merupakan fenomena baru, karena kemiskinan senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan juga merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterbukaan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah kesenjangan baik antar golongan penduduk maupun pembangunan antar wilayah, yang diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli, sebagaimana tercermin dari rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki pendapatan berada dibawah garis kemiskinan yang dijadikan sebagai ukuran resmi kondisi kemiskinan di Indonesia. (Gunawan.S,2002:6)

Berbagai program upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan beserta segala penyebabnya. Upaya yang dimaksud tidak saja diarahkan untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dalam rangka membangun semangat dan kemandirian masyarakat miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai pelaku dalam berbagai tahap pembangunan. Dalam konteks inilah pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin menjadi sangat penting dan strategis, mengingat jumlahnya yang relatif besar dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut dalam implementasinya belum sinergi dan *overlap* satu sama lainnya, serta kurang terfokus dalam menetapkan sasaran program (Gunawan.S,2002:47). Dimana upaya yang telah dilaksanakan pada masa lampau mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun

secara umum belum mampu meningkatkan keberdayaan penduduk miskin sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai program yang telah dilakukan tersebut belum juga dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan secara substansial dan ditengarai sampai detik ini belum optimal, tidak berpihak pada masyarakat miskin, bahkan disinyalir salah sasaran.

Data makroskopis hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas) Maret 2009 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, mengemukakan bahwa yang menjadi TITIK NOL kinerja pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan data penduduk miskin Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) dan Data PPLS08 hasil verifikasi 30 Oktober 2009, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar 3.079.822 Rumah Tangga Miskin (RTM) *by name by address* terbesar di 8.505 desa/kelurahan, 662 kecamatan dan 38 kabupaten/kota. Rumah tangga miskin tersebut terbagi ke dalam strata sangat miskin, sebanyak 493.004 (16%), miskin 1.256.122 (41%) dan hampir miskin sebanyak 1.330.696 (43%). (Makalah Semiloka penanggulangan kemiskinan di Universitas Brawijaya pada tanggal 6 Oktober 2011)

Rumah tangga dengan strata sangat miskin merupakan rumah tangga *the poorest the poor*, yang dalam kesehariannya mereka sulit memenuhi kebutuhan minimal dalam hidup secara layak dan bermartabat. Kemiskinan yang membelenggu rumah tangga sangat miskin berupa ketidakberdayaan (*powerlessness*) untuk menembus struktur sosial, sehingga mereka terpinggirkan dan dipinggirkan dari proses dan hasil pembangunan. Sedangkan rumah tangga sangat miskin adalah kelompok yang termarginalisasikan, terdevaluasi, dan mengalami keterampasan serta pembungkaman dalam derajat paling tinggi diantara kategori rumah tangga miskin.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif, sehingga kedudukannya bukan hanya sebagai obyek namun lebih menempatkan masyarakat penerima program sebagai subyek yang ikut serta menentukan program yang menurutnya tepat dan bisa berkembang menuju kemandirian, khususnya di bidang ekonomi. Dengan kata lain program ini lebih mengutamakan pendekatan *people centered based development*, yakni pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat, yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup masyarakat sendiri. Masyarakat penerima program yang memutuskan, menjalankan dan mengawasi hasil dari pelaksanaan program. Keberhasilan dan keberlanjutan program sangat tergantung pada semangat. Tekat dan komitmen masyarakat sendiri.

Persoalannya, pemberdayaan keluarga tidak semata-mata menyangkut aspek materiil ataupun ekonomi dan teknologi, ataupun aspek non material seperti otonomi (kekuasaan). Lebih dari itu pemberdayaan berarti pula menyangkut aspek para pelaksana dan penerima, dalam hal ini berkaitan dengan pola relasi sosial yang terjadi antara keduanya memiliki kontribusi besar untuk menunjang keberhasilan sebuah program

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan sangat pesat, tingginya urbanisasi tanpa diimbangi oleh keahlian (*skill*) membawa konsekuensi logis menculnya daerah-daerah *slum* di pusat-pusat kota Malang yang secara otomatis menambah kuantitas penduduk miskin perkotaan di kota

Malang. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) mengalami banyak kendala baik dari para pelaksana maupun penerima program yang membutuhkan penanganan lebih serius.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pola relasi sosial dalam implementasi PNPM-MP di Kota Malang sebagai upaya mewujudkan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan secara nasional dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kerangka Konseptual

Pengembangan relasi social dalam implementasi program PNPM-MP di Kota Malang diharapkan mampu mengatasi masalah ketidakberdayaan masyarakat miskin perkotaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, bahkan terbaikannya hak-hak warga masyarakat miskin perkotaan. Untuk itu diperlukan asumsi dasar sebagai berikut :

- Relasi social tersebut berorientasi pada bagaimana hubungan/ interaksi social yang terjadi antara sesama pelaksana, antara pelaksana dengan penerima program dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan program mulai dari menentukan sasaran, melaksanakan sampai dengan evaluasi monitoring program dengan memperhatikan : konsep melayani dan dilayani, kesadaran diri sebagai seorang yang bertugas memberikan pelayanan/bantuan, pemahaman tentang orang lain (yang berarti menghargai orang lain bagaimanapun kondisi dan keadaan orang tersebut perlu mendapatkan penghargaan terhadap diri pribadinya), komunikasi (yang berarti bagaimana membawa suasana yang peduli/ care terhadap penderitaan orang lain, sehingga orang tersebut merasa

- mendapatkan perhatian) serta tanggung jawab sebagai amanah.
- Sinergi antara pemerintah (dalam hal ini para pelaksana), pihak swasta dan warga masyarakat miskin perkotaan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Program untuk mewujudkan tercapainya standar implementasi yang *care, cooperative dan social responsibility*.
 - Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaksana maka perlu dikembangkan pemahaman dan kesadaran para pelaksana dalam implementasi program yang berorientasi pada interaksi sosial ke dua belah pihak
 - Relasi sosial dalam implementasi program melalui sinergi pemerintah dan masyarakat sebagai alternatif model pengembangan konsep peran pelaksana agar dapat berperan secara *responsive dan terintegrasi* yang mencirikan model interaksi sosial dalam implementasi PNPM-MP yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan diperlukan kajian yang mendalam, karena didalamnya melibatkan berbagai hal seperti isi kebijakan, para pelaksana, dan masyarakat penerima program itu sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan lebih banyak mengkaji interaksi diantara institusi yang ada, yaitu pemerintah dan masyarakat beserta peran sosial yang dimainkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga diharapkan akan diperoleh data yang mendalam, kaya informasi dan kaya makna.

Untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan terutama dilihat dari para pelaksana sebagai pelaku yang terlibat di dalamnya, diperlukan kecermatan untuk mengungkapkannya, karena pada dasarnya

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat fenomenologis, dimana penelitian ini berusaha memahami makna dibalik peristiwa/kejadian. Berdasarkan pertimbangan itu maka secara metodologis jenis penelitian kualitatif ini akan mampu mengungkap fenomena yang akan diteliti.

Penelitian ini diawali dengan kegiatan lapangan, yaitu dengan melakukan observasi langsung tentang peran pelaksana baik pemerintah, swasta dan warga masyarakat sendiri yang dilihat dari pemahaman, kesadaran tentang kepedulian dan tanggung jawab sosial yang meliputi aspek partisipasi, akses, kesetaraan, keadilan, *responsiveness dan transparansi*. Selanjutnya akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan sekaligus mengembangkan pola relasi sosial dalam implementasi PNPM-MP di Kota Malang dan untuk menentukan materi pelatihan dalam uji coba model.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, dengan pertimbangan bahwa di Kota Malang terdapat rumah tangga/keluarga miskin yang merupakan sasaran program PNPM-MP, yang disinyalir sarat dengan berbagai permasalahan yang ada, baik dari faktor pelaksana maupun dari para penerima program. Dari berbagai permasalahan yang ada, persoalan yang urgen adalah berkaitan dengan pola relasi sosial yang terjadi sebelum dan selama program tersebut berlangsung. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh pola relasi yang terjadi antara pelaksana sebagai pemberi program dan penerima/sasaran program

Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah para pelaksana yang terlibat dalam implementasi PNPM-MP di Kota Malang. Penentuan

subyek penelitian ini dilakukan secara acak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka subyek penelitian adalah para pelaksana program yang berjumlah 28 orang, dengan rincian sebagai berikut : 5 Orang dari Kel. Tanjungreko Kec. Sukun, 5 Orang dari Kel. Bandulan Kec. Sukun. 4 Orang dari Kelurahan Gadingkasri Ke. Klojen, 5 Orang dari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing, 4 Orang dari Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, 5 Orang dari Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen

Sedangkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan relasi sosial dengan penerima program, maka dilakukan dengan menggali data dengan tehnik wawancara yang melibatkan para penerima program sebagai informan.

Tehnik Pengumpulan dan Analisa Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui dengan observasi, interview dan angket. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif, sehingga analisa datanya dilakukan dengan mendiskripsikan temuan data berdasarkan focus masalah yang telah ditetapkan.

Adapun aspek yang diteliti adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana model relasi sosial yang terjadi dalam kaitannya dengan beberapa aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yaitu aspek yang berkaitan dengan penentuan sasaran program, bentuk program dan supervisi monitoring program, serta evaluasi program yang kesemuanya menjadi bagian yang saling mendukung dalam implementasi program. Pemikiran ini didasari adanya fenomena tentang minimnya pengetahuan masyarakat baik penerima program maupun pelaksana di lapangan tentang visi, misi dan tujuan program yang kesemuanya erat kaitannya dengan relasi sosial terjadi selama implementasi program berlangsung.

Analisa data dalam penelitian ini mempergunakan model inektif dan mengalir, menurut Miles dan Haberman (dalam Sugiyoro,2007:92), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Reduksi Data

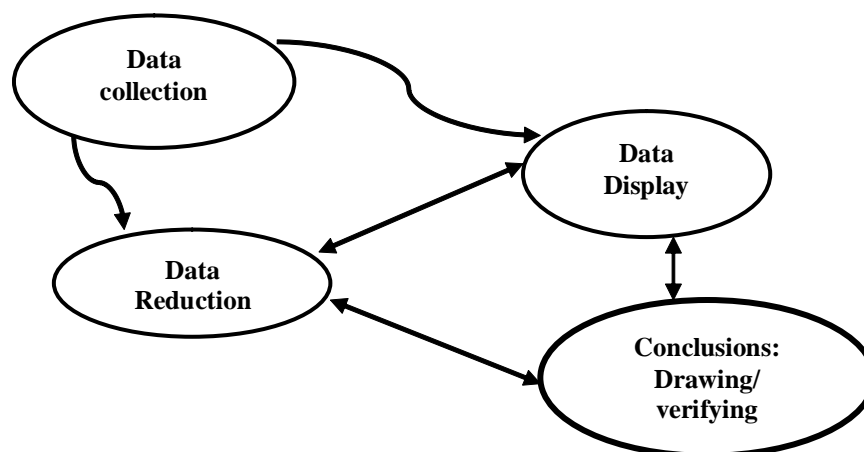
Merupakan proses penganalisaan data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk menjawab tujuan yang telah ditetapkanya.

Penyajian Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka penyajian datanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubunga antar kategori. Menurut Miles dan Haberman (dalam sugiyono,2007:95) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kulitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas , dapat berupa hubungan kausalitas atau interaktif, hipotesis dan teori. Kegiatan analisa data dalam penelitian ini merupakan proses kegiatan yang mengalir dan saling terkait satu sama lain (model interaktif) antara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Model interaktif (interactive model) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model interaktif

Sumber : Miles dan Haberman (dalam Sugiyono,2007:91)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa program PNPM-MP di Kota Malang, dalam implementasinya menyebar ke 5 (lima) kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan : 1) Sukun, 2) Lowokwaru, 3) Kedungkandang, 4) Klojen dan 5) Blimbing. Dengan jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebanyak 96 KSM, yang terdiri dari 617 Orang penerima program, dengan total biaya BLM PNPM-MP sebesar Rp. 309.250.000,00. (Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Implementasi PNPM-MP di Kota Malang

PNPM-MP di Kota Malang adalah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendampingan masyarakat dalam melakukan menyusun dan perencanaan pembangunan masyarakat. PNPM-MP mendampingi masyarakat membuat perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang selama ini masih menjadi persoalan di Kota Malang. PNPM-MP juga terlibat dalam pendampingan untuk penyusunan musrenbang di tingkat kelurahan.

Pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan dengan melakukan pendampingan terhadap ekonomi mikro,

dikhususkan pada permodalan. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan P2KP sebelum adanya PNPM-MP. Permodalan yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada masa P2KP di Kota Malang yang bermasalah sebelumnya dibantu untuk membuat struktur dan sistem baru (ada perbaikan BKM dan BKK). Apabila kinerja pinjaman bergulirnya sudah ada perbaikan (sudah pengembalian pinjaman modal sudah mulai berjalan) maka dana 20% dapat diberikan. Pada tahap selanjutnya apabila lancar maka boleh akan ada penambahan modal.

PNPM-MP melakukan pemberdayaan kepada masyarakat bertumpu pada unsur perubahan dalam diri masyarakat. Perubahan dalam diri masyarakat dapat diartikan dengan penggalian nilai-nilai positif ke arah pembangunan dan revitalisasi pengenalan jati diri dan harga diri, kepercayaan diri, saling peduli, di dalam menyelesaikan permasalahan atau tantangan awal pembangunan yang membutuhkan keterikatan dan keterpaduan. Nilai-nilai yang digali selama ini mencakup :

- Masyarakat di berbagai kelurahan di Kota Malang masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap warga masyarakat setempat. Semangat gotong royong masih relatif tinggi terutama pada saat ada tetangga yang terkena musibah (kematian). Masih adanya kepedulian di

masyarakat tersebut merupakan satu poin untuk melakukan pemetaan sosial.

- Memilih aktor-aktor strategis yang ada di masyarakat setempat. Menemukan siapa aktor yang selama ini dihormati dan disegani oleh masyarakat.
- Menemukan kelompok-kelompok sosial strategis yang ada di masyarakat, baik kelompok formal maupun informal
- Bagaimana pola informasi dan penyebaran informasi terjadi., serta media apa saja yang efektif untuk menyebarkan informasi tersebut.
- Mengetahui waktu yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
- Kondisi demografis dan geografis kelurahan dampingan
- Faktor lingkungan apa yang berpengaruh baik positif maupun negatif
- Paradigma masyarakat dalam kemiskinan.

Pada dasarnya saat membuat sebuah perencanaan penanggulangan kemiskinan bersifat partisipatif dengan melibatkan warga di setiap kelurahan. Perencanaan tersebut dibuat oleh BKM/LKM bersama masyarakat.

Program kegiatan ekonomi berupa pengembangan usaha mikro dan kecil sebanyak 463 unit dan melibatkan 42.134 keluarga miskin. Sumber pendanaanya dari APBN sebesar Rp2,23 miliar, APBD Rp553 juta, dan swadaya masyarakat Rp241,5 juta dengan total Rp3 miliar. Jumlah modal lancar yang dikelola oleh BKM se-Kota Malang sejak 2000 sejumlah Rp5 miliar.

Berlaku untuk semua tahap pencairan di lokasi lama/sedang berjalan yang telah menerima BLM dari P2KP atau PNPM P2KP dan telah melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria memuaskan maka maksimum 20% dari BLM yg baru diterima

dapat digunakan untuk menambah modal kegiatan pinjaman bergulir. Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria minimum maka dapat melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir tetapi tidak boleh menambah modal kegiatan pinjaman bergulirnya dari BLM yang diterimanya. Bila kinerja pinjaman bergulirnya mencapai kriteria dibawah minimum maka tidak boleh melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir dan harus melakukan perbaikan sampai mencapai kriteria minimum dan bila setelah batas waktu yang diberikan/ ditetapkan oleh KMW masih belum mampu memperbaiki kinerja pinjaman bergulir sampai kriteria minimum maka LKM harus menutup kegiatan pinjaman bergulir, menarik semua piutang dan menggunakan dana yg terkumpul untuk kegiatan sosial dan infrastruktur.

Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi PNPM-MP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan - kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses

pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, PNPM-MP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensi sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat

Informasi Bapak Setiono, sbb : “Pada dasarnya pelaksanaan PNPM-MP ini tidak jauh berbeda dengan Program P2KP yang lalu, dan pelaksanaannya juga sama dengan kelurahan-kelurahan yang lainnya yang menerima program PNPM ini, karena secara teknis ada buku petunjuknya. Secara umum kader pengelola dan masyarakat di Kelurahan ini (maksudnya Purwantoro, Kec.Blimbing Kota Malang) tidak mengalami hambatan dalam memperoleh akses informasi karena program tersebut sudah disosialisasikan melalui rapat koordinasi baik dengan ketua RW dan RT serta para wakil dari masing-masing RT untuk mendata sekaligus menyebarluaskan di wilayah RT nya masing-masing. Keterlibatan warga masyarakat secara langsung ini diharapkan menghindari salah sasaran sekaligus mengoptimalkan peran langsung masyarakat”.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juli Astutik dan Rachmad KDS tentang implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) menunjukkan bahwa masyarakat menganggap program tersebut merupakan bantuan yang asalkan membuat proposal pasti diberi bantuan. Terdapat 100 proposal yang dibuat oleh masyarakat dan akhirnya terseleksi hanya 5 KSM yang lolos dan berhak mendapatkan bantuan program. Karena kondisi inilah maka dalam program PNPM tersebut masyarakat pada saat mendapatkan sosialisasi tentang

program masyarakat memperoleh pendampingan dari para fasilitator sekaligus. Dimana masyarakat melalui KSM masing-masing yang sudah terbentuk diminta untuk membuat pengajuan melalui proposal secara detail tentang identitas anggota, jenis usaha yang dilakukan, besarnya dana yang diajukan. Jika belum benar maka diminta untuk merevisi sampai betul-betul memenuhi persyaratan.

Sosialisasi dilakukan bukan hanya berkaitan dengan pengajuan bantuan program, namun juga berkaitan dengan sistem pengembalian dana bergulir tersebut, jangan sampai ada masyarakat yang tidak faham tentang program, jangan sampai masyarakat penerima program punya anggapan bahwa program PNPM-MP tersebut bergulir dan penerima tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dana tersebut.

Hasil wawancara dengan penerima program Bu Siti Alimah (Penerima program) mengemukakan bahwa : “Pas ada pemberitahuan dari kelurahan kemarin itu saya senang, apalagi saya kan sudah amprah tiga kali dan lancar terus. Alhamdulillah saya bisa menambah modal usaha sehingga jenis dan jumlah barang dagangan saya sekarang terus bertambah dan untungnya juga bertambah. Dan saya tidak perlu lagi cari hutangan di Bank yang bunganya tinggi.

Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh Bu. Suparmi (Penerima program) “Saya senang sekali dengan bantuan pinjaman dari kelurahan itu, dengan anggota kelompok yang lain saya juga tidak jauh berbeda jumlah pinjamannya. Uangnya bisa untuk tambah modal jualan. Biasanya dari hasil penjualan saya mendapatkan penghasilan kotor antara Rp.200.000 – Rp. 300.000/hari. Dengan adanya tambahan modal saya bisa menambah variasi menu makanan, karena jika kualitasnya bertambah, ya harganya bisa dinaikkan sehingga secara langsung juga menambah pendapatan saya setiap harinya, ya memang tidak banyak tapi ada peningkatan sehingga dapat manabung walau

dalam jumlah yang kecil. Karena saya punya citi-cita memperbaiki warung saya ini, biar kelihatan lebih bersih sehingga akan lebih banyak pembelinya.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi juga tergantung dari peran faskel (fasilitator kelurahan), paradigma Faskel dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan. Menurut ketua Korkot ada dua macam konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh Faskel, yaitu berorientasi kepada proyek dan berorientasi program. Faskel yang berorientasi kepada proyek menjalankan tugasnya hanya sebatas kepentingan administratif (bekerja) saja sedangkan yang berorientasi kepada program lebih idealis dan visioner benar-benar memberikan pendampingan semaksimal mungkin, tidak terbatas pada waktu dan tempat.

Hasil wawancara dengan Farid (pelaksana program/Fasilitator), mengemukakan bahwa : selain sebagai fasilitator PNPM-MP juga melakukan pemasaran sosial, dalam artian PNPM-MP harus jeli terhadap permasalahan-permasalahan sosial dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Permasalahan dan potensi tersebut dibawa ke dinas terait untuk mendapatka bantuan, dan juga kepada lembaga pendidikan biar mendapatkan bantuan berbagai macam pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat (yang berdampak secara ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat).

Posisi Faskel (PNPM-MP) adalah sebagai fasilitator dari BKM untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga terkait. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang menurut Farid (KorKot), “BKM dilarang melakukan pengadaan, menjadi pemasok material maupun menjadi makelar.”

Sebagai media pembelajaran antara KSM dibentuk KBK (komunitas Belajar Kelurahan). Antara BKM dan UP setiap bulan selalu mengadakan rapat bulanan untuk melakukan evaluasi, dalam rapat bulanan

tersebut wajib dihadiri oleh anggota KSM. Adapun yang dievaluasi adalah dampak dari program ekonomi bergulir, apakah setelah mendapatkan dana ekonomi bergulir ada perubahan yang terjadi di KSM.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh, maka PNPM-Mandiri memberikan bantuan untuk masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan dan bantuan dana. Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di desa/kelurahan masing-masing. Di dalam proses pendampingan akan ada pelatihan yang akan dilakukan kepada masyarakat untuk menambah ketrampilan dan pelaksanaan kerja. Untuk melihat efektivitas program pelatihan masyarakat, konsultan dan fasilitator PNPM-MP perlu melakukan penilaian terhadap perubahan sikap dan ketrampilan masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mengikuti pelatihan.

Persoalan yang sering timbul dalam pelatihan yang dilakukan PNPM-MP seringkali masyarakat belum mengerti arti penting dari pelatihan dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Dengan memahami pengelolaan ekonomi keuangan rumah tangga dengan baik sebuah keluarga akan mudah untuk mengatur kebutuhannya, karena ia akan memperhitungkan setiap rupiah yang dikeluarkannya. Sedangkan bantuan dana akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM ini bersifat stimulant dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan.

Pada dasarnya penggunaan dana BLM dapat digunakan secara luwes dengan

berpedoman kepada PJM Pronangkis (perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan), pemberdayaan aspek tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/ desa yang bersangkutan. Penggunaan dana BLM digunakan untuk kegiatan tridaya yang terdiri dari komponen kegiatan lingkungan, komponen kegiatan sosial dan komponen kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat.

Pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin merupakan salah satu upaya dalam PNPM-MP untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa terlepas dari kemiskinannya. Pinjaman bergulir diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga digunakan untuk memulai usaha baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kesopanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin diberikan langsung kepada masyarakat melalui badan keswadayaan masyarakat (BKM) di masing-masing desa. Pemberian pinjaman bergulir tidak diberikan kepada setiap keluarga yang ada di setiap desa tapi BKM dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang ada di masing-masing desa yang menilai layak atau tidaknya masyarakat tersebut diberi pinjaman dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor budaya, pribadi, sosial, dan psikologis masyarakat.

Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 500.000,- per orang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Artinya bahwa besar pinjaman pertama tersebut bisa lebih rendah dari Rp. 500.000,- apabila berdasarkan penilaian kemampuan membayar kembali yang bersangkutan memang hanya sebesar

itu. pinjaman berikutnya tergantung pada catatan pembayaran kembali dan kemampuan dana UPK, dapat diberikan pinjaman yang lebih besar, memperoleh pinjaman kembali lebih cepat dari daftar tunggu yang lain karena pembayaran kembalinya lebih baik atau diberi pinjaman yang sama dengan jasa pinjaman yang lebih rendah. Kebijakan ini diatur oleh BKM.

Pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat masih dianggap oleh masyarakat seperti pemberian-pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sering dianggap hangus oleh masyarakat dan masyarakat juga tidak perlu membuat laporan pembukuan dalam usaha ekonomi produktifnya, maka akan sulit untuk mengukur keberhasilan pinjaman dana bergulir tersebut.

Pola Relasi Sosial Dalam Implementasi Pnpm-Mp Di Kota Malang

Relasi antar sesama Pelaksana Program

Interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan dan dibutuhkan. Interaksi yang didasari oleh kepentingan/tujuan yang sama akan melahirkan kerjasama diantara anggotanya. Kerjasama akan terbentuk semakin kuat diantara mereka, karena adanya kepentingan untuk mencapai tujuan bersama pula.

Relasi/hubungan sosial sebelum implementasi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kedekatan diantara para pelaksana sebelumnya, jika sebelum implementasi program para pelaksana sudah saling mengenal dan bahkan akrab, maka akan memudahkan koordinasi selanjutnya berkaitan dengan implementasi dan berbagai permasalahan sosial yang dimungkinkan akan timbul selama pelaksanaan berlangsung.

Kekompakan, kebersamaan dan relasi yang terjadi diantara para pelaksana akan sangat membantu bahkan akan menjadi modal untuk kedepannya, mengingat dalam implementasi ini sangat dibutuhkan koordinasi, kerjasama para pelaksana sebagai satu kesatuan tim yang solid dan tidak memihak berkaitan dengan implementasi program PNPM-MP tersebut.

Relasi/ hubungan sosial yang yang dibutuhkan sesama para pelaksana dalam implementasi program merupakan kunci dari keberhasilan program itu sendiri. Dalam kaitannya dengan itu semua dibutuhkan relasi/ hubungan sosial yang professional, relasi yang saling memberi dan menerima, bersifat rasional yang artinya saling percaya, terbuka dan menguntungkan satu sama lainnya dan terjadi secara intensif serta berlangsung secara *face to face*.

Relasi sosial atau hubungan yang terjadi antara para pelaksana program dapat disampaikan pada table berikut ini ;

Tabel 1.Data tentang relasi sosial para pelaksana sebelum implementasi program

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Sudah sangat akrab	7	25 %
2.	Akrab	12	42,86 %
3.	Sudah saling kenal	9	32,14 %
4.	Belum mengenal sama sekali	-	
Jumlah		28	100

Sumber : Data diolah 2012

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa relasi sosial antara para pelaksana sebelum implementasi program, pada dasarnya satu sama lain minimal sudah saling mengenal, hal ini disebabkan karena pada umumnya para pelaksana tersebut diambil dari warga setempat, sehingga sangat memungkinkan bahwa satu sama lainnya sudah saling mengenal, bahkan terdapat 7 orang (25%) para pelaksana sudah sangat akrab dan 12 orang (42,86%) menyatakan akrab.

Hubungan yang demikian ini akan sangat membantu memudahkan para pelaksana saling koordinasi, mengingat tidak akan ada rasa sungkan, bahkan terdapat diantara para pelaksana tersebut yang sudah memiliki nomor kontak HP masing-masing dalam satu kelurahan.

Sedangkan Relasi Selama Implementasi Program berlangsung dapat didiskripsikan sebagai berikut : Relasi/hubungan sosial selama implementasi program berlangsung sangat penting dan urgen, mengingat selama proses berlangsung tidak menutup akan terjadi banyak kendala yang dihadapi dari sesama pelaksana program itu sendiri, mulai dari persoalan baik yang datang dari diri pelaksana itu sendiri seperti masalah individu pelaksana, masalah kerja, masalah keluarga serta masalah yang datang dari masyarakat penerima program serta masalah dari masyarakat secara luas.

Berikut disampaikan data tentang relasi sosial selama implementasi program berlangsung, sebagai berikut :

Tabel 2.Data tentang relasi sosial para pelaksana selama program berlangsung

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Selalu melakukan Koordinasi	12	42,86 %
2.	Jarang melakukan koordinasi	16	57,14 %
3.	Tidak pernah koordinasi	-	-
Jumlah		28	100

Sumber : Data diolah

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa relasi/hubungan sosial para sesama pelaksana selama program berlangsung selalu melakukan koordinasi sebanyak 12 orang atau 42,86 %, Berdasarkan hasil penggalan data dengan Bapak Adi.S tokoh masyarakat sekaligus kader pelaksana program menyampaikan bahwa : “ Koordinasi itu penting dilakukan bahkan setiap 1 bulan sekali rutin, hal ini dimaksudkan bukan hanya

sekedar koordinasi namun juga untuk meminimalisir persoalan yang ada serta segera mencari solusi yang cepat dan tepat, yang pada akhirnya dapat memperlancar jalannya program”.

Sedangkan selebihnya terdapat 16 orang atau 57,14 % menyatakan jarang melakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan antar sesama pelaksana merupakan modal sekaligus motivasi bagi para pelaksana maupun penerima program, karena dengan dilakukannya koordinasi akan dapat diketahui sejauhmana perkembangan program, kendala yang dihadapi sekaligus dapat dicarikan solusi yang cepat dan tepat.

Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas, secara teori dapat dijelaskan bahwa relasi sosial yang terjadi diantara sesama para pelaksana selama proses berlangsungnya program, maka dapat dikategorikan dalam pola jaringan semua saluran, artinya semua orang sebagai pelaksana telah melakukan relasi/ interaksi satu sama lainnya sesama pelaksana. Hal ini menunjukkan adanya adanya kerjasama (*cooperation*) yang memperkuat solidaritas sesama para pelaksana untuk mencapai tujuan bersama. namun disadari sepenuhnya oleh para pelaksana bahwa koordinasi ini jarang dilakukan, hal tersebut disebabkan karena beberapa factor yang melatarbelakanginya. Data tersebut di bawah ini akan disampaikan tentang factor penyebabnya, sebagai berikut :

Tabel 3. Data tentang factor penyebab jarang nya koordinasi para pelaksana selama program berlangsung

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Bekerja di luar Kota	7	25 %
2	Kesibukan Bekerja	16	57,14 %
3	Tidak Undangan Koordinasi	4	14,28 %
4	Tidak tau	1	3,57 %
	Jumlah	28	100 %

Sumber : Data yang diolah

Tabel 3. tersebut menunjukkan bahwa jarang nya koordinasi para pelaksana tersebut dikarenakan berbagai factor yang melatarbelakanginya, baik itu internal para pelaksana itu sendiri, seperti bekerja di luar kota mencapai 7 orang 25%, kesibukan bekerja 16 orang 57,14 % dan 4 orang (14,28%) menyatakan tidak ada undangan koordinasi, serta 1 orang (3,57%) menyatakan tidak tau.

Fenomena ini menjadi sangat penting mengingat dalam implementasi berbagai program kegiatan koordinasi sangat diperlukan untuk menyatukan misi dan visi serta saling berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Namun tidak dipungkiri bahwa para pelaksana telah melakukan koordinasi yang merupakan bentuk kerjasama dari rasa tanggungjawab sosial bersama dalam mengemban amanah mengimplementasikan program PNPM-MP.

Sesuai dengan teori tentang relasi sosial bahwa bentuk kerja sama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian di mulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Atas dasar itu, anak tersebut akan menggambarkan bermacam-macam pola kerja sama setelah menjadi dewasa. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semuanya. Juga harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama, supaya rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik, begitu juga hal nya dengan masyarakat penerima program PNPM-MP. Kerjasama sangat dibutuhkan karena program tersebut merupakan paket kerja yang sifatnya kolektif kolegiel.

Pak Farid (Pelaksana program) menjelaskan bahwa interaksi yang terjadi antar sesama pelaksana ya biasa saja. Kami menjadi satu tim karena mendapatkan amanah untuk menjalankan dan sekaligus mengamankan program PNPM-MP ini jadi ya kami kompak untuk saling koordinasi dalam mensukseskan program. Kalau toh terjadi salah pengertain dari sesama pelaksana, biasanya kami saling mengingatkan. Kami melakukan koordinasi setiap 1 bulan sekali untuk memantau perkembangan program. Termasuk juga mencoba mengidentifikasi jika ada masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan menyusun laporan berkala.

Pernyataan Bapak Farid tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Hendrawan selaku pelaksana/ koordinator KSM yang mengemukakan bahwa dalam menjalankan amanah merealisasikan program tersebut tidak ada relasi sosial secara khusus antar pelaksana, ya biasanya kami berkumpul untuk melakukan koordinasi bersama dengan pak lurah dan ketua BKM sekaligus dengar pendapat dengan beberapa ketua KSM, dengan aktivitas ini kami mengetahui perkembangan di lapangan. Secara formal kami menjalankan sesuai dengan struktur yang ada tetapi secara non formal ya kami anggota masyarakat satu kelurahan yang harus bekerjasama, sehingga hubungan kami ya seperti anggota masyarakat yang lainnya. Tetapi saya akui bahwa relasi/hubungan kami sesama pelaksana di luar kelurahan kami ya ada semacam persaingan yang saling mengunggulkan masing-masing pelaksanaan program di kelurahannya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi program terdapat upaya untuk menunjukkan identitas kolektif yang merupakan ego bersama secara tim. Secara teori memang dijelaskan bahwa relasi sosial dapat berupa kerjasama dan persaingan. Biasanya kerjasama ditunjukkan oleh mereka dalam satu tim, namun persaingan ditunjukkan oleh antar tim. Ini

suatu fenomena yang sifatnya alamiah dan wajar.

Persaingan yang terjadi antar tim secara tidak langsung akan memperkuat solidaritas dan kebersaam dalam satu tim yang bersaing tersebut. Lazim dinyatakan oleh masing-masing dalam penggunaan simbol atau atribut yang mencirikan spesifikasi karakteristik masing-masing tim dengan nilai lebih jika dibandingkan dengan tim lainnya.

Relasi sosial antara Pelaksana dengan Penerima Program

Hal yang paling urgen disamping relasi/ hubungan para pelaksana dalam implementasi PNPM-MP tersebut adalah relasi sosial antara para pelaksana dengan penerima program. Para pelaksana dapat diibaratkan sebagai pemungkin yang mampu menjembatani antara PNPM-MP dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat luas, khususnya masyarakat penerima program. Melalui petunjuk tertulis (Juklis) para pelaksana dapat mensosialisaikan atau menyampaikan misi, visi, ruang lingkup serta berbagai hal yang berkaitan dengan apa itu program PNPM-MP dan bagaimana implementasinya.

Tabel 4. Data tentang Relasi /hubungan sosial antara para pelaksana dengan para penerima sebelum implementasi program

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Sudah sangat akrab	10	35,72 %
2.	Akrab	12	42,85 %
3.	Sudah saling kenal	6	21,43 %
4.	Belum mengenal sama sekali	-	-
Jumlah		28	100

Sumber : Data diolah 2012

Tabel 4. tersebut diatas menunjukkan bahwa 10 orang (35,72 %) para pelaksana menyatakan sudah sangat akrab dengan penerima program, hal ini disatu sisi memudahkan untuk melakukan bimbingan/ pendampingan disisi lain menjadi pertanyaan besar seberapa akrab hubungan keduanya,

mengingat bahwa dalam berbagai media disampaikan berita bahwa terdapat permasalahan yang urgen berkaitan dengan penerima sasaran program, fenomena ini juga menunjukkan indikasi kedekatan hubungan yang justru memicu permasalahan di lapangan berkaitan dengan implementasi program.

Sedangkan akrab sebanyak 12 orang 42,85 % dan sudah saling kenal sebanyak 6 orang 21,43 %. Data tersebut di atas lebih lanjut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pelaksana program Pak Farid, sebagai berikut : “Pada saat awal sekali dilakukan pendataan tentang siapa saja yang akan mendapatkan program dalam bentuk permodalan, yang dilakukan adalah mendata tentang siapa saja yang berhak mendapatkan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat unsur subyektivitas di saat menetapkan si.A berhak mendapatkan bantuan program, namun ada keraguan untuk memberinya, dengan pertimbangan selama dikenal yang bersangkutan kurang/tidak bertanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, apalagi mendapatkan tanggungjawab menerima program, kami justru khawatir program tidak dapat berjalan dan bergulir sesuai dengan yang kami harapkan, sehingga terkadang muncul subyektivitas berdasarkan berbagai pertimbangan. Kan kalau sampai program ini gagal kami juga yang kena nantinya. Selanjutnya diakui oleh beliau bahwa setelah dana bergulir tidak ada pendampingan dan monitoring secara khusus, biasanya yang kami lakukan adalah pemantauan saja dan memotivasi kepada masing-masing kelompok agar mengangsur tepat waktu jangan sampai terlambat apalagi menunggu”.

Tabel 5. Data tentang motivasi yang diberikan para pelaksana dengan penerima program saat awal program berlangsung

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Selalu memberi motivasi	16	57,14 %
2.	Jarang memberi motivasi	11	39,28 %

3.	Tidak pernah memberi motivasi	1	3,57 %
Jumlah		28	100

Sumber : Data diolah

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa relasi sosial yang dilakukan antara para pelaksana dengan penerima program di awal kegiatan dapat dilihat dari prosentase para pelaksana dalam memberikan motivasi. Dari data terdapat 16 orang pelaksana 57,14% yang memberikan motivasi di awal program, motivasi yang diberikan dalam bentuk penentuan anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), penyusunan proposal kegiatan dan motivasi pada saat penentuan jenis usaha serta besarnya anggaran yang diajukan oleh masing-masing KSM.

Terdapat 11 orang pelaksana 39,28 % yang menyatakan jarang member motivasi di awal, ini dimaksudkan bukannya tidak mau melainkan anggota masyarakat penerima program tersebut telah faham dengan tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi. Biasanya para penerima program tersebut bersifat *multi years*, sehingga tidak perlu lagi diberikan bimbingan/motivasi. Sedangkan 1 orang pelaksana 3,57% % menyatakan tidak pernah memberikan motivasi, dengan alasan bahwa kerja pelaksana BKM adalah kerja Tim, Jadi motivasi awal biasanya dikerjakan oleh ketua Tim, tidak perorangan.

Sedangkan Relasi /hubungan sosial antara para pelaksana dengan para penerima selama program berlangsung, dapat didiskripsikan sebagai berikut :

Tabel 6. Data tentang relasi sosial antara para pelaksana dengan penerima program

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Selalu melakukan Koordinasi	16	57,14 %
2.	Jarang melakukan koordinasi	12	42,86 %
3.	Tidak pernah koordinasi	-	-
Jumlah		28	100

Sumber : Data diolah

Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa terdapat 16 orang (57,14%) para pelaksana selalu melakukan koordinasi dengan masyarakat penerima program. Dengan alternative jawaban selalu melakukan koordinasi menduduki urutan terats, ini menunjukkan bahwa relasi/hubungan sosial yang dilakukan menunjukkan etiket adanya kerjasama dalam implementasi program.

Jarang melakukan koordinasi sebanyak 12 orang (42,86%). Lebih lanjut disampaikan oleh para pelaksana bahwa jarang melakukan koordinasi karena para pelaksana mempunyai anggapan bahwa pada saat sosialisasi program dan pengarahan awal peserta/penerima program rata-rata sudah memahami tentang program tersebut, sehingga koordinasi tidak perlu dilakukan secara rutin bisa dilakukan dengan melihat usahanya.

Pengurus KSM lainnya Bapak Heri yang mengemukakan bahwa setelah dana bergulir kami cukup memantau dari jauh. Kan tetangga sendiri dalam 1 kelurahan jadinya ya bisa ngontrol lah, namun secara khusus tidak ada pendampingan ataupun monitoring dari pelaksana. Mengingat di awal pelaksanaan program sudah kami jelaskan kepada para ketua faskel dan ketua KSM semuanya bahkan juga ada beberapa anggota KSM yang hadir tentang mekanisme, kewajiban masing-masing anggota kelompok penerima program serta bagaimana dana ini harus terus bergulir. Dengan harapan dana tersebut jga dapat dinikmati oleh yang lainnya yang kebetulan di program tersebut belum masuk. Selain itu juga memudahkan laporan administrasi pembukuan yang harus kami pertanggung jawabkan.

Tabel 7. Data tentang relasi sosial para pelaksana dengan penerima program Selama program berlangsung

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Menjalin relasi sosial dengan semua anggota KSM	6	21,43%

2.	Menjalin relasi sosial dengan beberapa anggota KSM	8	28,57%
3.	Menjalin relasi dengan Ketua KSM saja	14	50%
Jumlah		28	100

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut di atas dapat diketahui bahwa relasi sosial para pelaksana dengan penerima selama program berlangsung terdapat 14 orang (50%) para pelaksana menjalin relasi sosial dengan ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dengan alasan bahwa masing-masing ksm telah ada ketua yang bertanggungjawab terhadap kelompoknya, sehingga untuk efisiensi, maka dilakukan relasi sosial cukup dengan ketua saja, dan ketua yang akan menyebarluaskan kepada anggotanya. Pola ini dapat dikategorikan kedalam pola jaringan komunikasi dalam bentuk Y, Sedangkan yang lainnya terdapat 8 orang (28,57%) para pelaksana telah menjali relasi dengan sebagian anggota saja dan 6 orang (21,43%) para pelaksana menyalin relasi sosial dengan semua anggota kelompok. Ini menunjukkan indikasi pola jaringan komunikasi dalam bentuk rantai, dimana dalam pola jaringan komunikasi ini titik sentralnya adalah sumner informasi itu sendiri, dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ke ketua KSM yang kemudian diteruskan ke semua anggota.

Berkaitan dengan kualitas, maka pola relasi sosial bukan hanya mengetahui bagaimana bentuk polanya, namun yang tidak kalah pentingnya adalah durasi/waktu lamanya koordinasi serta isi/materi yang dibahas dalam koordinasi tersebut yang dilakukan antara pelaksana dengan penerima. Sehubungan dengan itu untuk mengetahui waktu/lamanya koordinasi dapat dilihat pada table di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 8. Data tentang frekuensi koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dengan penerima selama program berlangsung

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Dalam 1bulan 2 kali	20	71,43%
2.	Dalam 1 bulan 1 kali	5	17,86%
3.	Tidak Tentu	3	10,71%
Jumlah		28	100

Sumber : Data diolah

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 20 orang (71,43%) frekuensi koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana dengan penerima selama program berlangsung 1bulan 2 kali. Frekuensi ini dilakukan dengan jadwal yang sudah ditetapkan bersama antar pelaksana dengan penerima program. Koordinasi biasanya dilakukan di kelurahan dan tidak menutup kemungkinan dilakukan di tempat tinggal ketua KSM. Terdapat 5 orang (17,86%) para pelaksana melakukan koordinasi 1 bulan sekali, dan 3 orang (10,71%) mengatakan tidak tentu hal ini dilakukan karena KSM yang dibinanya merupakan kelompok lanjutan, yang dirasakan oleh pelaksana semua anggota KSM sudah sangat faham dengan bagaimana jalur dan alur yang harus dilakukannya, sehingga tidak butuh terlalu sering untuk koordinasi, pengawasan setiap hari dapat dilakukan, tidak harus koordinasi secara formal.

Pola Relasi Sosial Antar Sesama Penerima Program

Hal yang paling urgen disamping relasi/ hubungan antara para pelaksana, pelaksana dengan penerima, yang tidak kalah penting adalah relasi sosial antar sesama penerima program dalam implementasi program tersebut. Para penerima dapat diibaratkan sebagai obyek sasaran dari program, sehingga tolak ukur keberhasilan program dilihat dari bagaimana keberhasilan para penerima

program. Untuk itu dibutuhkan kerjasama/ koordinasi dalam diri kelompok KSM tersebut. Dalam satu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terdapat seorang ketua dan anggota, dimana ketua dipilih oleh masing-masing anggota KSM. Ketua adalah yang bertanggungjawab untuk memandu anggota tim dalam satu KSM sehingga program dapat dijalankan. Untuk itulah dibutuhkan relasi yang harmonis diantara ketua dan anggota serta sesama anggota dalam satu KSM tersebut. Pengembangan usaha ekonomis-produktif yang dilakukan umumnya akan melibatkan kelompok sosial lainnya (seperti keluarga, kelembagaan ekonomi dan sebagainya). Keterlibatan tersebut sangat bermanfaat dalam rangka menciptakan keseimbangan usaha ekonomi produktif keluarga. Sebagaimana konsep relasional dalam sistem sosial menjelaskan perlunya interaksi unsure-unsur lain yang berhubungan dalam mewujudkan keseimbangan. Keberhasilan interaksi membangun sangat bergantung pada komitmen semua unit sosial dalam masyarakat. Karena itu unsur yang membentuk masyarakat harus mampu menciptakan jaringan sosial dalam kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. Ini dikarenakan karakteristik keluarga miskin tidak memungkinkan mereka melakukan perbaikan kondisi sosial-ekonomi sendiri (Adi Fahrudin:103)

Jaringan sosial yang dikembangkan bertujuan untuk membantu keluarga dan masyarakat mengatasi kesulitan sosial-ekonominya. Kusnadi (dalam Adi Fahrudin:104) menjelaskan terdapat 2 jaringan sosial yang dibangun oleh keluarga miskin, yaitu (1) jaringan vertikal, yang terdiri dari jaringan kerabat, tetangga, campuran kerabat dan tetangga, serta campuran tetangga dan teman, dan (2) jaringan sosial horizontal, yang terdiri dari jaringan kerabat dan campuran jaringan kerabat dan tetangga. Jaringan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa barang, jasa atau sumber daya lainnya.

Jaringan sosial yang dibentuk tersebut menghasilkan pola interaksi “Aksi”, dimana para penerima melakukan interaksi didasari oleh keinginan untuk memecahkan masalah dengan lebih mendekatkan pada individu, kelompok atau kelembagaan dalam hal ini program PNPM-MP yang dapat memberikan kontribusi langsung untuk memecahkan masalah. Pola interaksi ini menurut Blumer dan Veegar (1993) dalam Adi Fahrudin:105) disebut dengan “*Interaksionisme Simbolik*”.

Hasil penelitian tentang relasi /hubungan sosial antara sesama penerima sebelum implementasi program dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima program, didiskripsikan, sebagai berikut :

Sebagai anggota yang menerima program Bu. Suji menjelaskan bahwa:

“Dalam satu KSM tersebut anggotanya ya sesama tetangga sendiri dalam satu RW, sehingga ya semuanya saling mengenal sebelumnya, bahkan ada juga yang masih , ya pokoknya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dari awal sudah ada penjelasan melalui ketua RT yang ditindaklanjuti oleh ketua PKK masing-masing RT”.

Pendapat tersebut di atas dipertegas oleh penerima program yang lainnya Ibu Idawati yang menjelaskan bahwa :

“Pada dasarnya kami itu sudah kenal satu sama lainnya, bahkan setelah mendapat penjelasan kami mengumpulkan teman-teman yang sekiranya memenuhi kriteria, bahkan kami juga sepakat untuk menjaga nama baik kelompok kami. Intinya hubungan kami dalam satu kelompok biasa saja tapi kompak, saling mengingatkan jika sudah saatnya mendekati jadwal jatuh tempo harus mencicil”.

Berdasarkan data tersebut di atas Nampak bahwa relasi sosial yang terjadi diantara sesama penerima program terjadi karena adanya kepentingan individu, namun kepentingan-kepentingan tersebut tidak merupakan upaya untuk mengarah kepada pertikaian, namun kepentingan individu yang sama tersebut telah menjadikan individu terikat dalam satu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan bantuan modal usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga.

Berdasarkan teori tentang pola jaringan komunikasi, maka relasi sosial yang terjadi diantara para penerima program sebelum program dijalankan adalah menganut pola jaringan komunikasi lingkaran, walaupun tidak sepenuhnya, dalam arti setelah mendapatkan informasi tentang program, komunikasi yang terjadi dimana setiap orang dapat berkomunikasi dengan dua orang yang bersebelahan dengannya, namun diakui bahwa pola seperti ini tidak ajeg terjadi dalam satu kelompok KSM, yang artinya pola jaringan komunikasi yang terbentuk sebelum pelaksanaan program tidak dapat digeneralisasikan bahwa semua kelompok KSM yang semua semuanya memiliki pola yang sama dalam bentuk lingkaran.

Sedangkan Relasi sosial antara sesama penerima program dalam pemberdayaan masyarakat miskin mandiri perkotaan selama program berjalan merupakan kunci barometer keberhasilan program, mengingat untuk mengetahui keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi anggota masing-masing kelompok KSM tersebut. Untuk itulah relasi sosial yang terjadi diantara para anggota tersebut mencirikan tingkat kesehatan kondisi kelompok dan kekompakan dalam implementasi program.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara diperoleh data sebagai berikut :

Sebagai anggota yang menerima program Bu. Suji menjelaskan bahwa :

“Bantuan modal dana bergulir yang diterima sangat membantu dalam menambah modal jualannya. Ya memang kami disibukkan dengan tugas dan pekerjaan yang harus kami lakukan setiap harinya. Hanya pada saat menjelang jatuh tempo waktunya mengangsur biasanya kami saling mengingatkan, sebentar lagi waktunya bayar, sebab di toko saya ini tempatnya orang-orang termasuk penerima program berbalanja kebutuhan pokok dan sayur mayor setiap pagi hari. Ya saling mengingatkan biar kita tidak nunggak dan tidak ada kesan nakal. Kan kalau beres ke depannya juga akan menjadi perhatian dan diutamakan. Kalau tentang hubungan sosial diantara kami biasa saja tidak ada yang khusus, karena setelah program berjalan kami masing-masing disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, namun begitu sebagai anggota dalam satu kelompok biasanya kami saling bertukar fikiran dan bertukar informasi”.

Pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan informan Bu Sani, (penerima program) bahwa :

“Setiap aktivitas yang dijalankan oleh masing-masing kelompok menjadi tanggung jawab anggota kelompok tersebut. Jadi tidak ada hubungan khusus harus bagaimana begitu, yang penting modal cair, tinggal menjalankan amanah untuk mengupayakan modal agar terus bergulir nantinya. Ya hanya kalau ketemu biasanya bertanya, gimana sudah mengangsur ? Jika sudah ya sudah, jika belum biasanya kami saling mengingatkan. Sudah hampir waktunya mengangsur lho, jangan sampai telat. Cuma itu saja, tidak lebih”.

Lain lagi dengan pernyataan informan Bu. Asih (penerima program), mengemukakan bahwa :

“Biasanya setelah menerima program, kami disibukkan oleh pekerjaan kami, tetapi kami dalam satu kelompok biasa saja tidak ada perubahan atau harus khusus seperti apa, ya mengalir saja, tapi kadang-kadang kami saling berkunjung untuk mengetahui dan bercerita tentang kondisi keluarga serta usaha kami masing-masing. Dan kadang bertanya setelah dapat bantuan dana program dipakai untuk modal usaha apa saja ? dan bagaimana perkembangan usahanya. Namun kita biasanya ada koordinasi khusus dalam satu kelompok setiap bulan 1 kali, pada minggu ke 3, yang kebetulan waktunya mendekati jatuh tempo untuk mengangsur. Namun saya akui bahwa tidak semua anggota KSM memiliki program koordinasi seperti itu, menyesuaikan saja dengan kebutuhan para anggota masing-masing KSM”.

Bapak Sidik, (penerima program) mengemukakan bahwa :

“Bantuan yang diberikan melalui program ini sangat membantu sekali, buat tambahan modal dan dapat meningkatkan penghasilan memang sih Cuma sedikit tapi meningkat dari sebelumnya, Ya memang enakya selama mengikuti program tersebut kita disamping mengangsur kan juga sekaligus menabung jadi pas waktunya membayar pinjaman saya juga bisa menabung. Karena saya ini kebetulan dipercaya teman-teman satu kelompok untuk menjadi ketua ya saya menyarankan pada teman-teman untuk menabung juga pada saat membayar dan membayarnya juga harus tepat waktu.

Jika ada salah satu yang belum punya uang ya kita berembuk bersama dan kesepakatan aja dulu mana yang ada nalangi dulu. Asalkan semua pengertian. Pokoknya jangan sampai ada yang terlambat membayar, karena satu saja terlambat akan mempengaruhi satu kelompok, ya tidak enak saya sebagai ketua kelompok, bisa-bisa dianggap nakal dan tidak akan diberi kesempatan yang berikutnya kan kita semuanya jadi rugi”

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bu Hartini (penerima program), yang mengatakan bahwa :

“Wah saya senang sekali dapat bantuan dari program yang diadakan di kelurahan ini, karena dapat membantu kelangsungan jualan saya ini bu, lumayan sangat membantu. Apalagi dilakukan secara berkelompok dan kelompok saya ini tidak pernah terlambat, karena jika saya kebetulan tidak punya uang pada saatnya membayar angsuran, saya pinjam dulu pada teman yang lain sekelompok, dan pada saat teman saya itu yang tidak ada, saya punya ya gantian saya yang membantunya. Saya dan kelompok merasa sama-sama saling membutuhkan. Kami semua berusaha untuk tidak telet membayar, karena tidak enak sama ketua dan pak lurah. Kan kalau lancar mengangsur juga nantinya akan dapat kemudahan jika membutuhkan lagi.

Bapak Sidik, sebagai ketua KSM mengemukakan bahwa:

“Diantara kelompok-kelompok penerima program tersebut terdapat hubungan biasa saja, tidak ada saling menjelekkan atau apapun., karena siapapun anggota kelompok disibukkan

oleh pekerjaan yang harus dijalankannya, ya kalau di awal-awal paling suma bertanya dapat bantuan berapa ? setelah itu ya sudah. Kalau toh ketemu paling ya bertanya wis nyicil, Ya sudah begitu saja”.

Secara spesifik selama program berjalan tidak ada pola jaringan komunikasi yang mencirikan spesifikasi relasi sosial diantara para anggota, namun dapat dijelaskan bahwa relasi sosial yang terjadi dapat dikategorikan dalam pola jaringan komunikasi yang bersifat semua saluran, dalam arti semua anggota kelompok KSM tersebut dapat saling berinteraksi satu sama lainnya. Keberadaan ketua kelompok merupakan motivator bagi masing-masing anggota untuk mengingatkan tentang kewajibannya masing-masing anggota, hal ini disebabkan karena ketua kelompok KSM juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota yang lainnya ini dikarenakan ketua kelompok memang diambil dari anggota KSM itu sendiri, sehingga posisinya (hak dan kewajibannya) sama dengan anggota yang lainnya, yang sifatnya saling melengkapi.

Dalam upaya keberlangsungan program diterapkan sistem kebersamaan yang sifatnya in group dengan sistem “Tanggung renteng”, yang artinya jika salah satu anggota dalam KSM tersebut tidak atau belum dapat melunasi kewajibannya untuk mengembalikan melalui iuran, maka dengan kesepakatan bersama dari awal anggota yang lain ikut membantu menutupi kekurangan yang harus dibayarkan dalam satu KSM tersebut. Masing-masing anggota KSM sudah berkomitmen untuk saling membantu dan satu kelompok ini sudah saling terbuka satu sama lain dalam hal kondisi keuangan, sosial, karena satu kelompok tersebut pada umumnya bertetangga sejak lama bahkan turun temurun menempati tempat tinggalnya tersebut.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pola relasi sosial diantara sesama

penerima program bantuan dapat diklasifikasikan kedalam pola jaringan komunikasi yang berbentuk jaringan Roda, tapi di saat yang lainnya bisa juga berbentuk pola jaringan komunikasi semua saluran, yang maksudnya bahwa dalam kelompok KSM tersebut seorang anggota yang biasanya menjadi pemimpin merupakan pusat komentar dari setiap anggota kelompok. Karena pemimpin (orang pusat) ada dalam jaringan, ia bebas berkomunikasi dengan keempat anggota lainnya, namun bukan berarti mereka hanya dapat berkomunikasi dengan si pemimpin saja. Namun pola tersebut tidak bersifat tetap artinya dalam kondisi tertentu sesama anggota penerima dapat berinteraksi satu sama lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Keberhasilan implementasi Program tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, baik dari para pelaksana sendiri, maupun dari penerima program, bahkan pola relasi yang terjadi antara aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pola relasi sosial yang terjadi, yaitu :

- Pola relasi sosial antar sesama para pelaksana menunjukkan pola jaringan komunikasi yang bersifat semua saluran yang memungkinkan semua para pelaksana saling melakukan interaksi/ relasi sosial, yang mengarah pada kerjasama (*cooperation*).
- Pola relasi sosial antar pelaksana dengan para penerima menunjukkan jenis pola jaringan komunikasi dalam bentuk Y dan Lingkaran.
- Pola relasi antara sesama penerima program menunjukkan pola jaringan komunikasi dalam bentuk lingkaran dan semua saluran. Yang lebih mengarah pada pola interaksi social “aksi”, dimana pola ini disebut dengan *interaksionisme simbolik*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- Kepada Pemerintah Kota Malang
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan upaya mencapai keberhasilan implementasi program PNPM-MP dengan melalui pemberian pelatihan kepada para pelaksana dalam menjalin relasi selama program berlangsung.
- Kepada Para Pelaksana Program
Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi berkaitan dengan implementasi PNPM-MP di Kota Malang, Mengingat sangat urgennya Pola relasi social dalam keberhasilan implementasi PNPM-MP, dibutuhkan pelatihan kepada para pelaksana di tingkat Kecamatan dan kelurahan tentang relasi social yang komunikatif dan komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif semua unsur pelaksana. Jaringan komunikasi yang seharusnya diciptakan oleh sesama para pelaksana, antara pelaksana dengan penerima program dan antara sesama program adalah relasi sosial pola jaringan yang sifatnya semua saluran, dimana pola relasi sosial ini yang memungkinkan semua para pelaksana dan penerima program untuk berpartisipasi aktif sehingga tercipta kerjasama antar sesama pelaksana dan penerima program di setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi monitoring bahkan sampai pada tahap terminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2011, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Pen. Humaniora, Bandung.
- Adi Fahrudin, Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Pen. Humaniora, Bandung
- Adi Isbandi Rukminto, 2001, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), Lembaga Penerbit, FE Universitas Indonesia. Jakarta
- Astutik, Juli, 2003, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan melalui P2KP (Studi di Kelurahan Merjosari Kota Malang), Universitas Muhammadiyah Malang.
- _____, 2008, Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Malang. Universitas Muhammadiyah Malang
- _____, 2009, Fenomena Kemiskinan di Kota Malang (Substansi dan Rekomendasi Aksi), Makalah dalam FGD “Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Strategis Nasional Atas Peran Negara Donor, MNCS dan Lembaga Internasional. Peneliti Dr.Adriana.E, dkk Kerjasama LIPI Jakarta dengan FISIP- UMM
- Bruce L. Berg, 2006, *Qualitative, Research Methods for The Sosial Sciences*, California State University, Long Beach
- Denzin, Norman K and Vonna.S, Lincoln, 1994, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication.
- Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Rafika Aditama, Bandung.
- Gunawan Sumodiningrat, 2009, Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ilhami, 2000, Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Usaha nasional, Surabaya.
- Ilhami, 2000, Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Usaha nasional, Surabaya.
- James Midgley, 2005, Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam. DEPAG RI Jakarta.
- Jim Ife Frank Tesoriero, 2008, Community Develppment, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahmad KDS, Juli Astutik, 2005, Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), di Kota Malang. Laporan Penelitian tidak dipublikasikan.
- Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta
- Tubbs, Stewart, L, dan Moss Sylvia, 2005, *Human Communication* (Konteks-Konteks Komunikasi, Terjemahan Oleh Deddy Mulyana dan Gembirasari), PT Remaja Rosdakarya Bandung